

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Cahyawati Dwi Putri, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:Gramata Publishing, 2011)
- Efendi A'an, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)
- H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hamzah Andi, Penegakan Hukum Lingkungan,( Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2000)
- Philipus M. Hadjon, et.all., Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001)
- Prodjohamidjojo Mr. Martiman, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005)
- Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011)
- Siringoringo R.O.B. dkk., Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cetakan Pertama
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Cetakan Keempat

Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Tjakranegara R. Soegijatno, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2008)

Tjandra W. Riawan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005)

Wijoyo Suparto, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara),(Surabaya: Airlangga University Press,2005)

Wiyono R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

### C. Jurnal Hukum

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 2, Nomor 2, (2010).

Yurike Inna Rohmati C,dkk., Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4, (2017).

Aju Putrijanti, Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, Nomor 3, (2013).

A'an Efendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Perspektif, Volume XVIII, No. 1, (2013).

Mukhlis, Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, (2010).

### D. Internet

<https://www.greeners.co/berita/416-kasus-kejahatan-lingkungan-berhasil-ditindak-klhk-sepanjang-2016/> diakses pada Rabu, 23 Januari 2019, pukul 12.44 WIB.

